



---

## Peran Stakeholder dalam Penyelesaian Konflik Lahan Parkir di Palembang Square

Ahmad Yusuf Pratama<sup>1</sup>, Laura Fransiska L. Tobing<sup>2</sup>, Zenzu Joni Ar<sup>3</sup>, Maretha Lekahena<sup>4</sup>, M. Bagas Pratama Putra<sup>5</sup>, M. Rifqi Fahjri<sup>6</sup>, Ricky safriyanto<sup>7</sup>

Universitas Sriwijaya, Indonesia<sup>1-7</sup>

Email Korespondensi : [07021282328019@student.unsri.ac.id](mailto:07021282328019@student.unsri.ac.id)

---

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Maret 2026, Article published: 01 Juni 2026

---

### ABSTRACT

Differences in interests among parties involved in parking lot management often trigger conflicts, particularly in urban areas with high mobility levels. This study aims to analyze the role of stakeholders in resolving parking management conflicts at Palembang Square, Palembang City. The research was conducted through a literature review by examining various scientific sources related to stakeholder theory, conflict management, and parking governance. Stakeholder analysis was carried out using four main characteristics: power, urgency, legitimacy, and proximity. The findings indicate that parking managers play the most dominant role because they possess high levels of power, legitimacy, and urgency in decision-making and parking operations control. In addition, parking attendants, community organizations, parking users, vendors, security officers, and local residents have varying degrees of influence on the conflict dynamics. Meanwhile, the Transportation Agency and the Public Order Agency act as supervisors and regulators in maintaining order in parking management practices. Therefore, conflict resolution requires coordination, communication, and cooperation among stakeholders so that parking management can operate in a more orderly, effective, and sustainable manner.

**Keywords:** Stakeholders, Parking Conflicts, Parking Management, Palembang Square.

### ABSTRAK

Perbedaan kepentingan di antara pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan tempat parkir seringkali memicu konflik, terutama di daerah perkotaan dengan tingkat mobilitas yang tinggi. Studi ini bertujuan untuk menganalisis peran pemangku kepentingan dalam menyelesaikan konflik pengelolaan parkir di Lapangan Palembang, Kota Palembang. Penelitian ini dilakukan melalui tinjauan pustaka dengan meneliti berbagai sumber ilmiah yang berkaitan dengan teori pemangku kepentingan, manajemen konflik, dan tata kelola parkir. Analisis pemangku kepentingan dilakukan dengan menggunakan empat karakteristik utama: kekuasaan, urgensi, legitimasi, dan kedekatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelola parkir memainkan peran paling dominan karena mereka memiliki tingkat kekuasaan, legitimasi, dan urgensi yang tinggi dalam pengambilan keputusan dan pengendalian operasional parkir. Selain itu, petugas parkir, organisasi masyarakat, pengguna parkir, pedagang, petugas keamanan, dan warga setempat memiliki berbagai tingkat pengaruh terhadap dinamika konflik. Sementara itu, Dinas Perhubungan dan Dinas Ketertiban Umum bertindak sebagai pengawas dan pengatur dalam menjaga ketertiban dalam praktik pengelolaan parkir. Oleh karena itu, penyelesaian konflik

---

*membutuhkan koordinasi, komunikasi, dan kerja sama antar pemangku kepentingan agar pengelolaan parkir dapat beroperasi dengan lebih tertib, efektif, dan berkelanjutan.*

**Kata kunci:** Pemangku kepentingan, Konflik parkir, Manajemen parkir, Lapangan Palembang.

## PENDAHULUAN

Teori stakeholder menghubungkan norma dengan strategi perusahaan. Perusahaan yang selalu mencari cara untuk melayani kepentingan stakeholder akan menciptakan nilai lebih dari waktu ke waktu. Power stakeholder sebagai instrumen bisnis yang penting dalam menciptakan kinerja yang bermakna bagi semua pihak yang terlibat dengan perusahaan. Legitimasi dan power selalu berkaitan dengan batasan kewajiban dan hak tertentu. Konsep nilai ekonomi yang relevan dibuat oleh perusahaan memberi peluang untuk mensejahterakan para stakeholder, dan masing-masing ingin mendapatkan keuntungan dari waktu ke waktu melalui kerjasama dan keterlibatannya dalam perusahaan. Teori stakeholder dianggap relevan oleh manajemen dalam hal power, legitimasi dan urgensi jika secara langsung mampu mempengaruhi strategi perusahaan dan keberlanjutan perusahaan, sebaliknya tidak bisa dianggap sebagai stakeholder. Menurut Freeman dan McVea pengaruh tidak langsung didasarkan pada tingkat ketergantungan sumber daya perusahaan dan stakeholder atau posisi yang dipegang perusahaan dalam jaringan stakeholder.

Pengelolaan lahan parkir di kawasan perkotaan merupakan persoalan sosial yang tidak dapat dipisahkan dari dinamika kepentingan ekonomi, kekuasaan, dan relasi antar aktor. Parkir tidak hanya berfungsi sebagai fasilitas pendukung mobilitas, tetapi juga menjadi sumber ekonomi yang bernilai, terutama di kawasan dengan aktivitas publik dan komersial yang tinggi. Kondisi ini menjadikan pengelolaan parkir rawan menimbulkan konflik, khususnya ketika terdapat tumpang tindih kepentingan antara aktor formal dan informal. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa konflik pengelolaan parkir sering kali muncul akibat lemahnya tata kelola serta tidak jelasnya pembagian kewenangan antar stakeholder.

Menurut Witjaksono dan Wibawani, dalam penelitian Implementasi Kebijakan Kerjasama Pengelolaan Parkir, keberhasilan pengelolaan parkir bergantung pada komunikasi yang baik dan pembagian peran yang jelas antara pemerintah daerah dan pihak swasta. Mereka berpendapat bahwa kerja sama yang diselenggarakan dapat mengurangi tumpang tindih otoritas dan meningkatkan efektivitas kebijakan pelaksanaan. Ini menunjukkan bahwa kerja sama antar pemangku kepentingan sangat penting untuk menghindari dan menyelesaikan konflik.

Penelitian Mahardita tentang praktik parkir ilegal di kawasan Universitas Diponegoro menunjukkan bahwa konflik parkir tidak semata disebabkan oleh pelanggaran aturan, melainkan juga oleh relasi kuasa antara pengelola informal, aparat pemerintah, dan kelompok masyarakat tertentu. Dalam konteks tersebut, negara tidak selalu hadir sebagai aktor yang sepenuhnya dominan, melainkan kerap terlibat dalam proses negosiasi dan kompromi dengan aktor non-negara.

---

Temuan serupa juga diungkapkan oleh Riswan et al. dalam studi mengenai dinamika sosial pengelolaan parkir di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Sinjai.

Penelitian tersebut menegaskan bahwa konflik parkir berkembang sebagai arena kontestasi kepentingan ekonomi dan legitimasi sosial antar aktor, di mana mekanisme penyelesaian konflik lebih banyak dilakukan secara informal melalui kesepakatan sementara dibandingkan melalui penegakan regulasi yang konsisten. Hal ini menunjukkan bahwa penyelesaian konflik parkir tidak hanya bergantung pada keberadaan aturan, tetapi juga pada relasi sosial dan posisi tawar masing-masing stakeholder. Meskipun demikian, sebagian besar kajian sebelumnya lebih menekankan pada aspek pengelolaan dan dinamika konflik, sementara analisis yang secara khusus membahas peran stakeholder dalam proses penyelesaian konflik masih relatif terbatas. Padahal, penyelesaian konflik merupakan tahap krusial yang menentukan apakah konflik dapat diredam secara berkelanjutan atau justru terus berulang dalam bentuk yang berbeda.

Menurut Syahrullah bahwa konflik parkir di Palembang disebabkan oleh perbedaan kepentingan ekonomi dan komunikasi yang buruk antara kedua belah pihak. Studi tersebut menunjukkan bahwa lahan parkir merupakan sumber daya ekonomi yang diperebutkan oleh berbagai pihak dengan tingkat kekuasaan dan legitimasi yang berbeda-beda.

Tanpa pemahaman yang memadai mengenai peran, kepentingan, dan strategi masing-masing stakeholder, upaya penyelesaian konflik berpotensi hanya bersifat sementara dan tidak menyentuh akar permasalahan. Kondisi tersebut juga tercermin dalam konflik pengelolaan lahan parkir di PS Mall Palembang, di mana sempat terjadi ketegangan antar organisasi kemasyarakatan dalam penguasaan dan pengelolaan parkir. Konflik ini menunjukkan bahwa ruang parkir di kawasan komersial tidak hanya menjadi arena ekonomi, tetapi juga ruang sosial yang diperebutkan oleh berbagai aktor dengan tingkat kekuasaan dan legitimasi yang berbeda.

Menurut Diaswari dan Sembiring menunjukkan bahwa untuk menyelesaikan konflik, semua pihak yang terdampak harus berbicara, menyetujui, dan berpartisipasi. Mereka menekankan bahwa konflik dapat diselesaikan secara konstruktif jika setiap pemangku kepentingan memiliki kesempatan untuk menyampaikan kepentingannya dan berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan.

Dalam situasi seperti ini, penyelesaian konflik tidak dapat dipahami sebagai proses administratif semata, melainkan sebagai hasil dari interaksi dan negosiasi antar stakeholder yang terlibat. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini memandang penting untuk mengkaji peran stakeholder dalam penyelesaian konflik pengelolaan lahan parkir di PS Mall Palembang. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui observasi dan wawancara mendalam, penelitian ini berupaya menganalisis bagaimana masing-masing stakeholder berperan dalam proses penyelesaian konflik, serta faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penyelesaian tersebut. Kajian ini diharapkan dapat melengkapi penelitian

---

terdahulu dengan memberikan perspektif empiris mengenai penyelesaian konflik parkir di kawasan komersial perkotaan.

## METODE

Penelitian ini melakukan review literatur, yang berarti membaca dan menelaah berbagai buku, jurnal, laporan, dan naskah ilmiah yang berkaitan dengan topik penelitian. Untuk digunakan sebagai landasan untuk kegiatan penelitian, ulasan literatur adalah uraian tentang teori, temuan, dan hasil dari berbagai bahan acuan. Metode ini digunakan untuk membuat kerangka pemikiran yang sistematis yang bergantung pada rumusan masalah yang akan diteliti. Selain itu, tinjauan literatur juga merupakan analisis menyeluruh dari penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan topik kajian. Dalam ulasan literatur, penulis memberikan ulasan, rangkuman, dan pendapat mereka tentang berbagai sumber pustaka yang digunakan.

Dalam penelitian ini, review literatur dilakukan untuk menemukan dan memahami berbagai perspektif ilmiah tentang peran pihak yang berwenang dalam menyelesaikan konflik lahan parkir di Palembang Square. Mereka yang melakukan penelitian melakukan pemeriksaan literatur yang mencakup studi tentang teori pemangku kepentingan, manajemen konflik, kebijakan publik, dan tata kelola perparkiran di kawasan komersial. Dalam literatur yang dipelajari, kami membahas aktor-aktor yang terlibat (seperti pemerintah daerah, pengelola parkir, organisasi masyarakat, dan pengguna parkir), jenis konflik yang terjadi, kepentingan dan pengaruh masing-masing pihak, dan mekanisme penyelesaian konflik yang digunakan dalam kasus serupa.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil analisis stakeholder dalam penyelesaian konflik lahan parkir di Palembang Square, pemetaan aktor dilakukan menggunakan empat atribut utama, yaitu kekuatan (power), urgensi (urgency), legitimasi (legitimacy), dan kedekatan (proximity). Perhitungan skor prioritas dilakukan menggunakan rumus pembobotan:  $(\text{Kekuatan} \times 3) + (\text{Urgensi} \times 2) + \text{Legitimasi} + \text{Kedekatan}$ . Menurut Parent dan Deephouse [8], atribut kekuatan memiliki derajat yang lebih tinggi dibandingkan urgensi, sedangkan urgensi memiliki derajat lebih tinggi dibandingkan legitimasi. Sementara itu, atribut kedekatan memiliki derajat yang sama dengan legitimasi. Oleh karena itu, pembobotan tersebut digunakan untuk menentukan tingkat prioritas dan pengaruh masing-masing stakeholder dalam konflik lahan parkir di Palembang Square. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa pengelola parkir memperoleh skor tertinggi dengan level sangat tinggi, disusul Dishub dan penjaga parkir pada level tinggi, sementara ormas, Satpol PP, pelanggan parkir, pedagang, satpam, dan warga sekitar berada pada level menengah hingga rendah. Temuan ini menunjukkan adanya perbedaan tingkat pengaruh antaraktor dalam konflik lahan parkir, di mana aktor yang memiliki kewenangan dan keterlibatan langsung dalam operasional parkir cenderung memiliki posisi yang lebih dominan dibanding pihak lain yang hanya terdampak

---

secara tidak langsung. Dengan demikian, konflik lahan parkir tidak hanya berkaitan dengan penggunaan ruang parkir, tetapi juga mencerminkan relasi kekuasaan, kepentingan ekonomi, dan kontrol sosial dalam ruang publik.

Hasil analisis tersebut kemudian dikaji menggunakan Teori Stakeholder Saliency dari Ronald K. Mitchell yang menjelaskan bahwa tingkat kepentingan stakeholder ditentukan oleh tiga atribut utama, yaitu power, legitimacy, dan urgency. Semakin lengkap atribut yang dimiliki suatu aktor, maka semakin tinggi pula tingkat saliency atau kepentingan strategisnya dalam suatu konflik. Dalam konteks konflik lahan parkir di Palembang Square, teori ini digunakan untuk memahami posisi dan pengaruh masing-masing stakeholder dalam proses penyelesaian konflik. Melalui pendekatan ini dapat dilihat bahwa tidak semua aktor memiliki tingkat pengaruh yang sama, karena terdapat pihak yang memiliki kekuasaan dan legitimasi lebih besar dibanding aktor lainnya. Oleh sebab itu, teori stakeholder saliency membantu menjelaskan mengapa beberapa stakeholder menjadi pusat pengambilan keputusan, sedangkan stakeholder lain hanya berperan sebagai pihak terdampak atau pendukung dalam konflik tersebut.

Berdasarkan klasifikasi stakeholder saliency, pengelola parkir termasuk dalam kategori definitive stakeholder karena memiliki atribut power, legitimacy, dan urgency secara bersamaan. Pengelola parkir memiliki kekuatan dalam mengatur operasional dan pengambilan keputusan terkait area parkir, memiliki legitimasi formal sebagai pihak pengelola, serta memiliki urgensi tinggi karena konflik secara langsung mempengaruhi stabilitas operasional dan pendapatan mereka. Selain itu, kedekatan pengelola parkir dengan aktivitas lapangan menjadikan aktor ini sebagai pihak yang paling memahami dinamika konflik yang terjadi. Dalam teori Mitchell, stakeholder yang memiliki ketiga atribut utama tersebut menjadi aktor yang paling menentukan dalam proses penyelesaian konflik. Temuan ini sejalan dengan penelitian Parwata et al. [9] yang menunjukkan bahwa efektivitas pengelolaan dan penertiban parkir sangat dipengaruhi oleh pihak pengelola lapangan serta koordinasi antaraktor yang memiliki kewenangan langsung terhadap area parkir.

Dishub dan Satpol PP termasuk dalam kategori dominant stakeholder karena memiliki atribut power dan legitimacy, namun tingkat urgensinya tidak setinggi pengelola parkir. Dishub memiliki kewenangan dalam pengawasan, regulasi, dan pengendalian kebijakan parkir, sedangkan Satpol PP berperan dalam menjaga ketertiban umum dan melakukan penertiban di lapangan. Dalam konflik lahan parkir di Palembang Square, kedua lembaga tersebut berfungsi sebagai regulator dan penengah konflik untuk menjaga stabilitas dan ketertiban area parkir. Temuan ini didukung oleh penelitian Ramadhan [10], Arma et al. [11], dan Jannah et al. [12] yang menunjukkan bahwa Dishub memiliki posisi strategis dalam pengawasan dan penertiban parkir liar, meskipun implementasinya sering menghadapi hambatan seperti lemahnya pengawasan lapangan dan adanya kepentingan non formal di area parkir.

Penjaga parkir termasuk dalam kategori dependent stakeholder karena memiliki urgensi tinggi dan kedekatan langsung terhadap konflik, tetapi tidak

memiliki kekuatan besar dalam proses pengambilan keputusan. Mereka menjadi pihak yang paling terdampak apabila terjadi perubahan kebijakan, penertiban parkir, maupun perebutan wilayah kerja parkir. Posisi tersebut menunjukkan bahwa penjaga parkir memiliki ketergantungan terhadap keputusan pengelola parkir maupun kebijakan pemerintah dalam menentukan keberlangsungan pekerjaan mereka. Dalam teori stakeholder salience, stakeholder dependent merupakan aktor yang memiliki kepentingan tinggi, tetapi tetap membutuhkan dukungan dari pihak yang memiliki kekuasaan agar aspirasinya dapat diperhatikan. Kondisi ini memperlihatkan bahwa konflik lahan parkir tidak hanya berkaitan dengan penguasaan ruang parkir, tetapi juga menyangkut aspek ekonomi masyarakat yang bergantung pada aktivitas parkir sebagai sumber mata pencaharian.

Ormas termasuk dalam kategori dangerous stakeholder karena memiliki kombinasi atribut power dan urgency, tetapi memiliki legitimasi formal yang rendah. Kekuatan ormas umumnya berasal dari kemampuan mobilisasi massa dan pengaruh sosial di lapangan, sehingga keberadaannya dapat mempengaruhi dinamika konflik lahan parkir. Dalam konflik di Palembang Square, ormas berpotensi menjadi faktor eskalatif apabila tidak dikelola dengan baik karena dapat menciptakan tekanan maupun konflik terbuka antar kelompok yang terlibat. Dalam teori stakeholder salience, stakeholder yang memiliki power dan urgency tanpa legitimasi formal dikategorikan sebagai dangerous stakeholder karena cenderung menggunakan tekanan atau pengaruh nonformal untuk mencapai kepentingannya. Oleh sebab itu, keterlibatan ormas dalam konflik lahan parkir perlu dikelola melalui pendekatan persuasif dan pengawasan pemerintah agar tidak menimbulkan ketidakstabilan sosial maupun gangguan keamanan di area konflik.

Pelanggan parkir termasuk dalam kategori demanding stakeholder karena memiliki urgensi dan kedekatan tinggi sebagai pengguna layanan parkir, namun tidak memiliki kekuatan maupun legitimasi formal dalam proses pengambilan keputusan. Mereka merasakan dampak langsung dari konflik, seperti ketidaknyamanan, tarif parkir yang tidak jelas, hingga berkurangnya rasa aman saat menggunakan fasilitas parkir. Meskipun pengaruh pelanggan terhadap kebijakan relatif kecil, keluhan dan tuntutan mereka tetap menjadi perhatian karena berkaitan dengan kualitas pelayanan dan citra kawasan pusat perbelanjaan. Temuan ini sejalan dengan penelitian Nazwa et al. [13] yang menunjukkan bahwa keberadaan parkir liar dapat mempengaruhi kenyamanan dan pengalaman konsumen saat melakukan aktivitas belanja. Oleh karena itu, pelanggan parkir tetap memiliki peran penting sebagai pihak yang terdampak langsung dan dapat mempengaruhi legitimasi pengelolaan parkir di mata masyarakat.

Pedagang termasuk dalam kategori discretionary stakeholder, satpam sebagai dormant stakeholder, dan warga sekitar berada pada posisi marginal karena ketiga kelompok tersebut memiliki legitimasi sosial sebagai pihak yang terdampak oleh konflik, namun tingkat power dan urgency relatif rendah. Pedagang merasakan dampak konflik terhadap aktivitas ekonomi dan kenyamanan usaha, satpam memiliki kedekatan dengan situasi lapangan tetapi keterlibatannya terbatas

---

pada aspek keamanan, sedangkan warga sekitar terdampak secara tidak langsung melalui gangguan ketertiban dan aktivitas lingkungan. Walaupun bukan aktor utama dalam pengambilan keputusan, keberadaan kelompok-kelompok ini tetap penting dalam menjaga stabilitas sosial di sekitar kawasan konflik. Temuan ini sejalan dengan penelitian Muhammad et al. [14] yang menjelaskan bahwa penyelesaian permasalahan parkir liar tidak cukup hanya melalui penertiban formal, tetapi juga memerlukan keterlibatan masyarakat sekitar agar tercipta kontrol sosial dan stabilitas lingkungan secara berkelanjutan.

Secara keseluruhan, struktur kekuasaan dalam konflik lahan parkir di Palembang Square menunjukkan pola semi-struktural, di mana pengelola parkir dan penjaga parkir menjadi pusat dinamika konflik karena memiliki keterlibatan langsung terhadap aktivitas operasional parkir, sementara pemerintah melalui Dishub dan Satpol PP berperan sebagai regulator dan penyeimbang konflik. Analisis berbasis stakeholder salience memperlihatkan bahwa penyelesaian konflik yang efektif perlu memprioritaskan koordinasi antara stakeholder utama, terutama pengelola parkir, pemerintah, dan pihak lapangan agar tercipta pengelolaan parkir yang lebih tertib dan stabil. Selain itu, potensi eskalasi dari ormas serta tuntutan pelanggan dan masyarakat sekitar juga perlu diperhatikan agar konflik tidak terus berulang. Kondisi ini menunjukkan bahwa penyelesaian konflik lahan parkir tidak dapat dilakukan hanya melalui penertiban formal, tetapi juga membutuhkan koordinasi antar stakeholder, pengawasan yang konsisten, serta pendekatan sosial yang mampu mengakomodasi kepentingan berbagai pihak yang terlibat dalam konflik tersebut.

## SIMPULAN

Kesimpulan dari hasil penelitian, konflik lahan parkir di Palembang Square tidak hanya berkaitan dengan penggunaan ruang parkir, tetapi juga mencerminkan adanya relasi kekuasaan, kepentingan ekonomi, dan legitimasi antar stakeholder yang terlibat. Pengelola parkir menjadi stakeholder paling dominan karena memiliki kekuatan, legitimasi, dan urgensi yang tinggi dalam pengelolaan operasional parkir. Dishub dan Satpol PP berperan sebagai regulator dan pengawas dalam menjaga ketertiban serta mengendalikan konflik yang terjadi di lapangan, sedangkan penjaga parkir menjadi pihak yang paling terdampak karena bergantung pada aktivitas parkir sebagai sumber ekonomi utama. Selain itu, keberadaan ormas, pelanggan parkir, pedagang, satpam, dan masyarakat sekitar turut mempengaruhi dinamika konflik dengan tingkat kepentingan dan pengaruh yang berbeda-beda.

Konflik pengelolaan parkir di Palembang Square menunjukkan bahwa penyelesaian konflik tidak dapat dilakukan hanya melalui penegakan aturan formal, tetapi juga membutuhkan koordinasi antar stakeholder, pengawasan yang konsisten, komunikasi yang efektif, serta pendekatan sosial yang mampu mengakomodasi kepentingan berbagai pihak. Oleh karena itu, kerja sama antara pemerintah, pengelola parkir, dan aktor lapangan menjadi faktor penting dalam menciptakan pengelolaan parkir yang lebih tertib, aman, dan berkelanjutan.

---

---

**DAFTAR RUJUKAN**

- Baharun, H. (2016). Manajemen Kinerja Dalam Meningkatkan Competitive Advantage Pada Lembaga Pendidikan Islam. *At-Tajdid: Jurnal Ilmu Tarbiyah*, 5(2), 243-262.
- Levina, E. Y., Kutuev, R. A., Balakhnina, L. V., Tumarov, K. B., Chudnovskiy, A. D., & Shagiev, B. V. (2016). The Structure of the Managerial System of Higher Education's Development. *International Journal Of Environmental & Science Education*, 11(15), 8143-8153.
- Laal, M. (2011). Knowledge Management in Higher Education. *Procedia Computer Science*, 3, 544-549.
- Budiyanto, M. A. K., Waluyo, L., & Mokhtar, A. (2016). Implementasi Pendekatan Saintifik dalam Pembelajaran di Pendidikan Dasar di Malang. *Proceeding Biology Education Conference*, 13(1), 48.
- Hatum, A. (2010). *Next Generation Talent Management: Talent Management to Survive Turmoil*. London: Palgrave Macmillan.
- Gottschalk, P. (2005). *Strategic Knowledge Management Technology*. Hershey PA: Idea Group Publishing.
- Baharun, H. (2016). Manajemen Kinerja Dalam Meningkatkan Competitive Advantage Pada Lembaga Pendidikan Islam. *At-Tajdid: Jurnal Ilmu Tarbiyah*, 5(2), 243-262
- Laal, M. (2011). Manajemen Pengetahuan di Pendidikan Tinggi. *Procedia Ilmu Komputer*, 3, 544-549.
- Budiyanto, M. A. K., Waluyo, L., & Mokhtar, A. (2016). Implementasi Pendekatan Saintifik dalam Pembelajaran di Pendidikan Dasar di Malang. *Proceeding Biology Education Conference*, 13(1), 48.
- Hatum, A. (2010). *Manajemen Bakat Generasi Berikutnya: Manajemen Bakat untuk Bertahan di Tengah Gejolak*. London: Palgrave Macmillan.
- Gottschalk, P. (2005). *Teknologi Manajemen Pengetahuan Strategis*. Hershey PA: Idea Group Publishing.
- Levina, E.Y., Kutuev, R.A., Balakhnina, L.V., Tumarov, K.B., Chudnovskiy, AD, & Shagiev, BV (2016). Struktur dari Sistem Manajerial Pengembangan Pendidikan Tinggi. *Jurnal Internasional Pendidikan Lingkungan & Sains*, 11(15), 8143-8153.